

---

# PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KERAJINAN KULIT DI KABUPATEN MAGETAN

**Hamami Cahya Prastika**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

## *Abstract*

*This study aims to describe the role of local government and the participation of Medium Small Micro Enterprises in the development of Leather Handicraft in Magetan Regency. The background of this research problem is MSME skin crafts in Magetan Regency is a superior product with the highest production of 76,462,240,300 in 2014 compare to other MSME. Therefore, researchers want to know what are the role of local government and participation of MSMEs in the development of leather craft in Magetan District.*

*The theory used to answer the first problem formulation about the role of local government is Gede Diva (2009) theory which divides the role of government into three, namely the role of government as facilitator, regulator and catalyst. Second, the participation of MSME executants use Cohen and Uphoff's theories in Distianto (2016) into four forms of its participation that are participation in planning, implementation, utilization of the results and participation in evaluation.. This research uses descriptive qualitative research method. The technique of determining the informant used purposive sampling technique. While the technique of collecting data is done through interviews, observation and documentation.*

*The result of this research is the role of government and the participation of UMKM actors in the development of leather handicraft in Magetan Regency has been running well. The typology of the government's role is in the role of the government as a facilitator because the government plays a role in the provision of tools such as sewing machines, providing e-IKM digital team facilitation and training. Whereas in the participation of MSMEs, the typology is found in the participation of the utilization of the results because UMKM actors use the granting machine from the government and follow the training program. Efforts made by the government for the development of SMEs leather craft provides the result of improving the quality of production to be a superior product of Magetan Regency. It's just plagued by human resources problems are reduced and have a low skill.*

**Keywords:** Role of Local Government, Participation of SMEs, MSME Development

---

## **PENDAHULUAN**

Pada Negara berkembang, salah satunya yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. Ekonomi yang terus bergejolak membuat masyarakat semakin merasakan beban kehidupan yang semakin berat. Semua sektor kehidupan mengarah pada industrialisasi yang akhirnya berujung pada peningkatan keuntungan sebagai patokan utamanya, hal ini menyebabkan berkurangnya empati masyarakat dengan lingkungan sekitar. Keadaan seperti ini memaksa masyarakat mengharuskan beradaptasi agar dapat bertahan hidup dimana keadaan yang dimaksud adalah industrialisasi yang terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat.

Saat ini, perkembangan jaman mempengaruhi tuntutan gaya hidup seseorang yang meningkat, pola pikir masyarakat juga semakin modern dan terkonsep dimana pada intinya masyarakat sekarang dituntut untuk memiliki kebutuhan yang kian hari kian tinggi serta kompleks. Akhir-akhir ini ekonomi dunia tidak stabil dan cenderung fluktuatif, para pelaku ekonomi harus mengikuti keadaan tersebut agar dapat melanjutkan usahanya di dunia pasar.

Respon dari pelaku ekonomi dapat dilihat dari peningkatan harga kebutuhan pokok, kenaikan tarif sehingga memiliki dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam menyikapi keadaan seperti ini, respon masyarakat sangat bervariasi, mulai dari menempuh pendidikan tinggi, kursus formal atau informal yang bertujuan meningkatkan kualitas serta keahlian yang ada dalam diri mereka. Untuk meningkatkan kualitas diri mereka, masyarakat berharap agar dapat memperoleh sumber penghasilan dengan bekerja pada bidang yang sesuai dengan kemampuannya.

Kondisi yang seperti ini menyebabkan persaingan menjadi ketat. Banyaknya masyarakat dengan keahlian yang ada dalam diri mereka semakin tinggi sehingga pekerjaan sulit diperoleh karena ketersediaan sumber daya manusia melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat tidak menggantungkan hidupnya pada lapangan pekerjaan yang tersedia, namun sebagian masyarakat justru menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang biasanya disebut dengan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM.

UMKM merupakan usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis

ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relative fleksibel (Supriyono, 2006:1).

Tenaga kerja yang terserap melalui jalur UMKM sudah termasuk dalam kategori cukup banyak jika dilihat dari jumlah total penduduk di Indonesia. Selain jumlah serapan tenaga kerja UMKM tersebut, jumlah serapan tenaga kerja yang terserap melalui jalur usaha formal belum dihitung, namun tetap saja sektor formal juga berperan dalam mengatasi pengangguran.

**Tabel 1**  
10 Besar Provinsi dengan Penyerapan Tenaga Kerja Paling Banyak di Indonesia Tahun 2014

No.	Provinsi	Angkatan Kerja yang Terserap (Orang)
1.	Jawa Timur	19.306.508
2.	Jawa Barat	19.230.943
3.	Jawa Tengah	16.550.682
4.	Sumatera Utara	5.881.371
5.	Banten	4.853.992
6.	DKI Jakarta	4.634.369
7.	Sumatera Selatan	3.692.806
8.	Lampung	3.673.158
9.	Riau	2.518.485
10.	Bali	2.272.632

Sumber : BPS, diolah

Dari tabel I.5 merupakan informasi mengenai serapan tenaga kerja gabungan antara sektor formal dan informal. Tabel I.5 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat atas dengan angkatan kerja yang terserap berjumlah 19.306.508 orang. Dengan ini dapat dikatakan bahwa sektor usaha informal atau sektor non pemerintahan yang paling mendominasi.

Salah satu UMKM yang ada di Jawa Timur yaitu terdapat di Kabupaten Magetan yang memiliki berbagai potensi industri yang pada umumnya potensi tersebut merupakan Industri berskala kecil dan menengah. Kabupaten Magetan memiliki cukup

banyak potensi mulai dari produk olahan makanan dan kerajinan yang sangat perlu untuk dikembangkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Adanya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan di dukung dengan sektor ekonomi unggulan yang mampu dijadikan potensi daerah bagi perkembangan Kabupaten Magetan. Hal ini sangat penting karena sektor tersebut dapat memberikan dua sumbangan yakni yang pertama, secara langsung akan menimbulkan kenaikan pada pendapatan faktor produksi daerah dan pendapatan daerah. Kedua, menciptakan permintaan atas produksi industri lokal (Taufik,2000).

**Tabel 2**  
Kerajinan Rakyat (Formal dan Non Formal) menurut Jenis, Unit Usaha dan Tenaga Kerja di Kabupaten Magetan Tahun 2014

No .	Jenis Industri Kecil/Kerajinan	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Hasil Produksi
1.	Tikar Mendong	420	630	1.006.080.000
2.	Grabah	239	359	5.451.164.400
3.	Batu Merah	3.741	9.353	55.525.424.000
4.	Genteng	1.510	3.775	48.266.100.000
5.	Pande Besi	115	403	3.455.000.000
6.	Kompom Minyak	3	8	18.000.000
7.	Pengolahan Kayu dan Mebelair	228	1.026	19.913.300.000
8.	Sulak Bulu	23	35	548.812.500
9.	Penjahit (Konveksi)	130	325	7.034.816.000
10.	Tempe	1.136	1.704	53.560.352.000
11.	Tahu	115	403	56.565.000.000
12.	Tape Singkong	76	114	1.992.993.000
13.	Krupuk Terigu	200	500	4.205.391.528
14.	Makanan Ringan	279	698	58.669.141.600
15.	Jamu Jawa	46	69	232.647.800
16.	Emping Mlinjo	268	402	29.371.303.300
17.	Penyaman	139	695	76.462.240.300

	Kulit			
18.	Sambel Pecel	31	109	2.118.644.600
19.	Nasi Jagung	22	33	123.165.000
20.	Jrangking	24	60	580.080.000
21.	Telur asin	7	25	630.000.000
22.	Percetakan	14	49	2.566.750.000
23.	Pecah Batu Koral	16	72	360.000.000
24.	Kasur	6	21	192.000.000
25.	Roti Bolu	38	171	6.060.600.000
26.	Lassery	66	297	7.230.000.000
27.	Gamelan	9	41	2.404.800.000
28.	Alas Kaki dari kulit	178	819	72.183.139.500
29.	Kerajinan Anyaman Bambu	5.626	15.134	72.280.859.923
30.	Rengginan	47	87	209.375.000
31.	Kerajinan Kaset	15	24	450.000.000
32.	Tas Plastik	1	3	30.000.000
33.	Barang dari Semen	79	277	3.489.166.700
34.	Gula Kacang/Enting-enting	23	62	1.064.700.000
35.	Emping Jagunng	3	14	945.000.000
36.	Batik Tulis	3	93	679.036.000
37.	Jenang Candi	4	15	540.000.000
38.	Kormelo (Manisan Kulit Jeruk)	2	15	24.732.000
39.	Carang Mas	40	150	1.149.000.000
40.	Rokok	1	15	519.750.000
41.	Kopi	1	26	337.236.000
42.	Ikut Pinggang	29	131	14.418.000.000
43.	Krupuk Rambak	24	108	39.840.000.000

44.	Kerajinan Kaca/Grafir	2	15	935.590.000
45.	Sapu Ijuk	33	72	544.320.000
46.	Sermiyer	25	71	399.375.000
	<b>Jumlah/total</b>	<b>15.037</b>	<b>38.501</b>	<b>654.601.086.150</b>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

Tabel I.7 menunjukkan bahwa hasil produksi terbanyak dari kerajinan rakyat formal dan non formal Kabupaten Magetan adalah jenis industri kecil/kerajinan penyaman kulit dengan hasil produksi yang berjumlah 76.462.240.300, unit usaha sebanyak 139 dan tenaga kerjs sejumlah 695. Penyaman kulit merupakan proses mengubah kulit mentah menjadi kulit tersamak (leather). Penyaman kulit biasanya digunakan hampir semua jenis ternak seperti kulit sapi, kerbau, domba, dan lain-lain. Pada tabel diatas ada 46 jenis industri kecil/kerajinan di Kabupaten Magetan dimana jumlah total unit usaha berjumlah 15.037, tenaga kerja berjumlah 38.501 serta jumlah total hasil produksi kerajinan rakyat formal dan non informal Kabupaten Magetan pada tahun 2014 sebanyak 654.601.086.150.

Salah satu industri kerajinan kulit berada di Jalan Sawo Kelurahan Selosari dan Kelurahan Kauman Kecamatan Magetan. Kabupaten Magetan memiliki kawasan industri kerajinan kulit yang menggunakan kulit sapi atau kambing dalam pembuatannya. Dari kulit tersebut dapat menghasilkan berbagai macam barang mulai dari tas, dompet, sarung tangan, jaket, ikat pinggang, sandal, sepatu, dan masih banyak lainnya. Namun, sentra yang paling terkenal tepatnya di Jalan Sawo karena jalur ini yang paling mudah dilewati kendaraan-kendaraan wisatawan untuk menuju tempat pariwisata Telaga Sarangan. Telaga Sarangan adalah salah satu tempat wisata yang paling terkenal di Kabupaten Magetan, letak sentra kerajinan kulit di Jalan Sawo mudah dijangkau wisatawan dan sangat strategis.

Berdirinya sentra industri kerajinan kulit ini merupakan suatu implementasi dari adanya penyamakan kulit. Lokasi penyamakan kulit berada di desa Ringinagung dimana letaknya sekitar 1,5 km/jam yang tidak jauh dari pusat kerajinan kulit di Selosari. Penyamakan kulit sendiri merupakan proses pembuatan bahan baku yang dibutuhkan pengrajin barang dari kulit sehingga hubungan penyamakan kulit dengan kerajinan kulit saling menguntungkan. Penyamakan merupakan proses produksi barang mentah menjadi barang setengah jadi, sedangkan kerajinan kulit merupakan proses produksi barang setengah jadi menjadi barang jadi.

Kerajinan kulit di Kabupaten Magetan yang terletak di Jalan Sawo Kelurahan Selosari dirintis pada tahun 1960, akan tetapi pada tahun 1950 penyamakan kulit sudah ada. Awalnya hanya sebagian orang yang

menekuni bidang kerajinan kulit ini, pada akhirnya meningkat dan terbukti mulai tahun 1985 Kelurahan Selosari di Kabupaten Magetan berkembang industri rumah tangga (home industry) yang menawarkan produk-produk klasik asli terbuat dari bahan kulit.

Hasil kerajinan kulit ini wilayah pemasarannya tidak hanya sebatas pasar lokal akan tetapi merambah hingga ke pasar regional seperti Jakarta, Bojonegoro, Sumatra, Samarinda, Sulawesi, Palu, Nusa Tenggara, Kalimantan, Probolinggo, Madura, Irian, serta daerah lainnya. Proses produksi kerajinan kulit di Kabupaten Magetan masih menggunakan cara tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan handmade. Hal tersebut menjadikan salah satu daya tarik bagi pengunjung karena dari segi kualitas produk kerajinan kulit di Kabupaten Magetan mampu bersaing dengan produk lainnya.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kerajinan kulit sudah menjadi produk unggulan di Kabupaten Magetan. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah yang aktif dalam pengembangan UMKM ini melalui program-program yang terselenggara. Tidak hanya karena peran pemerintah yang aktif dalam hal ini, namun partisipasi pelaku UMKM juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar terjalin hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan partisipasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah kerajinan kulit.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku UMKM terhadap pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan. Peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diusulkan oleh peneliti sudah cukup banyak, terutama yang berhubungan peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku UMKM. Namun, dalam setiap penelitian memiliki perbedaan subjek, metodologi, teori yang digunakan maupun analisis penelitian dari berbagai peneliti memiliki ciri khas masing-masing.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya, yang pertama bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pada UMKM dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan. Kedua, bagaimana partisipasi para pengrajin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi sebagai upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan.

Manfaat dari penelitian ini secara akademis adalah diharapkan dapat memberikan gambaran, wawasan, pengetahuan serta pemahaman mengenai peran pemerintah khususnya peran pemerintah daerah dalam keikutsertaannya untuk mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi dan dapat menjadi bahan referensi serta bahan kajian pada penelitian-penelitian selanjutnya dengan bidang yang

lebih relevan. Sedangkan, pada manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan sehingga dapat menjadikan sektor UMKM lebih berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

### **Peran Pemerintah Daerah**

Peran pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan lembaga atau instansi dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Diva menyatakan terdapat peran pemerintah yang menurutnya efektif dalam hal pengembangan UMKM sebagai berikut:

#### **1. Peran pemerintah sebagai fasilitator**

Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

#### **2. Peran pemerintah sebagai regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintahan daerah. Keduanya memiliki wewenangnya sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.

#### **3. Pemerintah sebagai katalisator**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses perkembangan dari UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pemberian penghargaan terhadap UMKM, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan

prasarana intelektual bagi UMKM (Gede Diva, 2009: 15).

### Partisipasi Pelaku UMKM

Partisipasi merupakan suatu bentuk keikutsertaan individu di dalam sebuah kelompok yang terlibat pada suatu kegiatan terhadap proses pelaksanaan pengambilan keputusan. Hubungan antara partisipasi dengan penelitian ini yaitu keterlibatan dari para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap upaya pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah pada unit UMKM Kerajinan Kulit. Bentuk partisipasinya menurut Cohen dan Uphoff dalam Distianto (Distianto, 2016:68) berupa :

1. Partisipasi dalam perencanaan  
Partisipasi dalam indikator ini berkaitan dengan perencanaan dan juga pengambilan keputusan akhir sebagai tahapan setelah keikutsertaan masyarakat dari proses perencanaan. Masyarakat juga diajak berdiskusi mengenai gagasan atau ide yang dimiliki untuk kepentingan dan tujuan bersama hingga mendapatkan kesepakatan bersama. Wujud dari partisipasi dalam perencanaan adalah kehadiran dalam proses temu, sumbangan gagasan atau ide, dan juga dapat berupa reaksi yang bisa berupa persetujuan atau penolakan mengenai program yang sedang didiskusikan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan  
Pelaksanaan merupakan pelaksanaan dari program-program yang telah disetujui bersama dengan masyarakat pada tahapan indikator perencanaan. Pelaksanaan program-program ini diperlukan keikutsertaan berbagai macam aspek dari pembangunan, khususnya masyarakat yang menjadi objek dari pembangunan, serta pemerintah yang bertindak sebagai sumber dari pembangunan. Partisipasi dengan level makro seperti ini dibutuhkan karena pada tahap indikator pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah menggerakkan sumber daya, sumber dana, kegiatan administrasi, dan penjelasan secara mendetail mengenai program-program yang akan dilaksanakan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil  
Dilihat secara makro, pengambilan manfaat dari hasil pelaksanaan artinya keberhasilan yang dari segi kuantitas dapat dilihat dari angka-angka yang menunjukkan keberhasilan, seperti persentase pelaksanaan keberhasilan pelaksanaan program dan sudah memenuhi target yang telah ditentukan atau belum. Sedangkan dari segi kualitas, dapat dilihat pengaruhnya pada output setelah program yang dimaksud dilaksanakan
4. Partisipasi dalam evaluasi  
Evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi mengenai program-program secara menyeluruh. Partisipasi pada evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui derajat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat. Dan keberhasilan dilihat dari kesesuaian tingkat

pencapaian suatu program sesuai dengan target yang telah direncanakan.

### Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah suatu usaha produktif bernilai ekonomi yang merupakan sektor usaha informal dan didirikan oleh perorangan atau kelompok kecil dengan jumlah penjualan tahunan paling banyak 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Jadi, UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UMKM Kerajinan Kulit yang berlokasi di Kabupaten Magetan.

### Pengembangan UMKM

Pengembangan adalah suatu proses memperbaiki kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi atau pihak yang bersangkutan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Dalam penelitian ini, pengembangan UMKM yang diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah agar dapat meningkatkan daya saing dari UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 melalui pengembangan yang dilakukan pada bidang:

- a. Produksi dan pengolahan
- b. Pemasaran
- c. Sumber Daya Manusia
- d. Desain dan teknologi

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan

##### a. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sebagai fasilitator dalam pengembangan UMKM Kerajinan Kulit dapat dilihat pada tabel 3

**Tabel 3**

Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator Dalam Pengembangan UMKM Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan

No.	Pengembangan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008	Peran Pemerintah
1.	Produksi dan	- Memberikan alat berupa mesin jahit

	Pengolahan	yang diberikan kepada kelompok yang tersebar pada empat titik yang berada di Jalan Sawo, Kauman, Mojopurno dan Jejeruk agar dapat digunakan bersama-sama
2.	Pemasaran	- Menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM satu bulan sekali - Mengadakan event berupa pameran
3.	Sumber Daya Manusia	- Memberikan pelatihan keterampilan
4.	Desain dan Teknologi	- Memberikan pelatihan keterampilan cara mendesain sepatu mulai dari teori dan pola sepatu

#### b. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator terhadap pengembangan UMKM Kerajinan Kulit dapat dilihat pada tabel 4

**Tabel 4**

Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator Dalam Pengembangan UMKM Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan

Peran Pemerintah	Bentuk Usaha Pengembangan	Keterangan
Peran Pemerintah sebagai Regulator	Peraturan Bupati Magetan Nomor 70 Tahun 2008	Mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. Peraturan Bupati ini dijadikan sebagai landasan hukum untuk melaksanakan tugas yang telah dilimpahkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Magetan untuk membangun, mengatur dan mengembangkan Koperasi dan

		UMKM di Kabupaten Magetan.
	Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2016	Mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Peraturan tersebut memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Secara langsung tugas dan fungsi dalam peraturan tersebut telah dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengatur dan mengembangkan UMKM khususnya Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan

#### c. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran Pemerintah daerah sebagai katalisator terhadap pengembangan UMKM kerajinan kulit dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5**

Peran Pemerintah Daerah Sebagai Katalisator Dalam Upaya Pengembangan UMKM Kerajinan kulit di Kabupaten Magetan

No.	Pengembangan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008	Peran Pemerintah

1.	Produksi dan Pengolahan	- Pemerintah mencoba membantu UMKM untuk menambah modal melalui kerjasama dengan BUMN seperti INKA agar tingkat produksi lebih meningkat
2.	Pemasaran	- Bekerjasama dengan TELKOM mendirikan wadah bagi pengrajin untuk belajar mengakses internet atau yang biasa disebut kampung digital
3.	Sumber Daya Manusia	- Merekrut pengrajin-pengrajin muda yang lebih inovatif dan produktif - Mendatangkan instruksi kerajinan kulit - Menyediakan workshop kepada calon pengrajin baru yang belum memiliki skill
4.	Desain dan Teknologi	- Memberikan pelatihan melalui kerjasama dengan BIPI (Balai Persepatuan Indonesia)

## 2. Partisipasi Pelaku UMKM dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan

### a. Partisipasi dalam Perencanaan

Partisipasi Pelaku UMKM dalam pengembangan kerajinan kulit dalam perencanaan dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6**

Partisipasi Pelaku UMKM Dalam Pengembangan Kerajinan Kulit Dalam Perencanaan

No.	Pengembangan berdasarkan UU No.20 Tahun 2008	Peran Pemerintah	Partisipasi Pelaku UMKM
1.	Produk dan Pengolahan	Fasilitator Regulator	- Memanfaatkan modal yang disediakan pemerintah untuk mendukung kualitas pembuat kerajinan kulit

2.	Pemasaran	Fasilitator Katalisator	- Bergabung dalam kampung digital yang disediakan pemerintah agar dapat memasarkan kerajinan kulit melalui sosial media
3.	Sumber Daya Manusia	Fasilitator Katalisator Regulator	- Ikut serta dalam musrenbang - Turut menyampaikan pendapat saat diskusi
4.	Desain dan Teknologi	Fasilitator Katalisator	- Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah

### b. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi pelaku UMKM dalam pengembangan kerajinan kulit dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7**

Partisipasi Pelaku UMKM Pengembangan Kerajinan Kulit Dalam Pelaksanaan

No.	Pengembangan berdasarkan UU No.20 Tahun 2008	Peran Pemerintah	Partisipasi Pelaku UMKM
1.	Produk dan Pengolahan	Fasilitator Katalisator	- Mengirim karyawannya untuk mengikuti program pelatihan
2.	Pemasaran	Fasilitator Katalisator	- Aktif mengikuti pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Prindustrian dan Perdagangan - Wujud pemasaran melalui brosur dan catalog dan juga sosial media
3.	Sumber Daya Manusia	Fasilitator Katalisator	- Aktif mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah

4.	Desain dan Teknologi	Fasilitator	- Melayani pesanan sesuai keinginan konsumen - Mencari reverensi model melalui internet
		Katalisator	

**c. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil**

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil yang dilakukan pelaku UMKM kerajinan kulit dapat dilihat pada tabel 8.

**Tabel 8**  
Partisipasi Pelaku UMKM Kerajinan Kulit dalam Pemanfaatan Hasil

No	Pengembangan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008	Peran Pemerintah	Partisipasi Pelaku UMKM
1.	Produk dan Pengolahan	Fasilitator	- Memanfaatkan mesin jahit yang diberikan oleh pemerintah
		Regulator	
2.	Pemasaran	Fasilitator	- Mendapatkan pelanggan baru
		Katalisator	
3.	Sumber Daya Manusia	Fasilitator	- Dapat mengimplementasikan hasil pelatihan dengan baik - Mengikutsertakan anak muda sebagai calon pengrajin yang lebih inovatif
		Regulator	
4.	Desain dan Teknologi	Katalisator	- Pengrajin menyesuaikan permintaan pelanggan sehingga dapat membuat berbagai macam sepatu

**d. Partisipasi dalam Evaluasi**

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan dari data yang diperoleh bahwa pelaku UMKM kerajinan kulit tidak melaksanakan partisipasi dalam evaluasi dapat dilihat pada tabel 9.

**Tabel 9**  
Partisipasi Pelaku UMKM Kerajinan Kulit Dalam Evaluasi

Partisipasi	Bentuk Partisipasi	Data Pendukung
Pelaku UMKM Kerajinan	Pelaku UMKM Kerajinan Kulit	

Kulit	Dalam Evaluasi	
Partisipasi dalam evaluasi	Tidak Ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengembangan kerajinan kulit setelah program dilaksanakan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaku UMKM Kerajinan Kulit hanya dijadikan sebagai target sasaran program pemerintah.</li> <li>Di saat program pemerintah telah selesai dilaksanakan, yang terjadi setelah itu hanya sampai di pemanfaatan hasilnya saja.</li> <li>Evaluasi hanya dilakukan pihak pemerintah dimana penilaian indikator keberhasilan program dilihat melalui program pemerintah yang telah berhasil berjalan sesuai dengan rencana.</li> </ul> </li> <li>Program pemerintah selalu sama setiap tahun <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah melaksanakan program yang sama setiap tahun dengan melihat bahwa program pemerintah telah dinilai berhasil dijalankan.</li> <li>Pemerintah tidak memberikan suatu inovasi program yang baru dalam upaya pengembangan UMKM dan hanya memberikan program yang sama karena keterbatasan anggaran dari pemerintah.</li> </ul> </li> </ol>



Jadi, peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku UMKM dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 10.

**Tabel.10**

Peran Pemerintah dan Partisipasi Pelaku UMKM dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan

No.	Pengembangan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008	Peran Pemerintah	Partisipasi Pelaku UMKM
1.	Produk dan Pengolahan	- Fasilitator	- Pelaksanaan, Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil
		- Katalisator	- Pelaksanaan
		- Regulator	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil
2.	Pemasaran	- Fasilitator	- Pelaksanaan, Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil
		- Katalisator	- Pelaksanaan, Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil
		- Regulator	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil
3.	Sumber Daya Manusia	- Fasilitator	- Pelaksanaan, Perencanaan, dan Pemanfaatan Hasil
		- Regulator	- Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil
		- Katalisator	- Perencanaan dan Pelaksanaan
4.	Desain dan Teknologi	- Fasilitator	- Pelaksanaan dan Perencanaan
		- Katalisator	- Pelaksanaan, Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil

### Kesimpulan

- Peran Pemerintah Daerah  
Secara umum, peran pemerintah dalam upaya pengembangan kerajinan kulit yang mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 sudah berjalan dengan

baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data hasil wawancara sebagai berikut :

- Peran Pemerintah sebagai Fasilitator  
Pada pengembangan UMKM yang berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 dalam produk dan pengolahan pemerintah telah memberikan fasilitas berupa mesin jahit. Pada pemasaran, pemerintah memberikan fasilitas dengan menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM satu bulan sekali. Mengenai Sumber Daya Manusia, pemerintah memberikan fasilitas berupa pelatihan keterampilan dan untuk desainnya, pemerintah juga memberikan pelatihan keterampilan cara mendesain sepatu mulai dari teori dan pola sepatu.
- Peran Pemerintah sebagai Regulator  
Pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2016 melalui tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, produk dan pengolahan serta Sumber Daya Manusia dijalankan sesuai apa yang tertulis di Peraturan Bupati Magetan
- Peran Pemerintah sebagai Katalisator  
Dalam menjalankan perannya sebagai katalisator, upaya pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai katalisator yang pertama pada produksi dan pengolahan, pemerintah mencoba untuk membantu pengrajin untuk menambah modal melalui kerjasama dengan BUMN seperti INKA. Kedua, Pemerintah bekerjasama dengan pihak TELKOM dengan mendirikan wadah bagi pengrajin untuk belajar mengakses internet atau yang disebut dengan kampung digital. Ketiga, Sumber Daya Manusia yaitu pemerintah mencoba merekrut pengrajin-pengrajin muda dengan memberikan pelatihan agar lebih inovatif dan produktif sedangkan yang keempat, desain dan teknologi peran pemerintah sebagai katalisator memberikan pelatihan melalui kerjasama dengan BIPI (Balai Persepatuan Indonesia).  
Jadi, tipologi peran pemerintah daerah di Kabupaten Magetan dalam upaya pengembangan kerajinan kulit terdapat pada peran pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah berperan dalam penyediaan alat berupa mesin jahit untuk memudahkan pengrajin dalam proses pembuatan sepatu, menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM agar pengrajin dapat memasarkan produk kerajinan kulit melalui website atau penjualan online serta memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan keterampilan.

- Partisipasi Pelaku UMKM  
Secara umum, partisipasi Pelaku UMKM juga sudah berjalan dengan baik dalam upaya pengembangan UMKM kerajinan kulit dengan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008. Hal ini dibuktikan melalui :

- a. Partisipasi dalam Perencanaan  
Pada produksi dan pengolahan, partisipasi dari masyarakat dengan memanfaatkan modal yang disediakan pemerintah untuk mendukung kualitas pembuatan kerajinan kulit. Selanjutnya pada pemasaran, pelaku UMKM bergabung dalam kampong digital yang disediakan pemerintah agar dapat memasarkan kerajinan kulit melalui website. Kemudian pada sumber daya manusia, pengrajin ikut serta dalam musrenbang dan menyalurkan ide saat diskusi berlangsung. Terakhir pada desain, partisipasi dari pengrajin yaitu dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah
- b. Partisipasi dalam Pelaksanaan  
Pertama dalam produk dan pengolahan, partisipasi pelaku UMKM dalam pelaksanaan yaitu mengirim karyawannya untuk mengikuti program pelatihan. Kedua, pada pemasaran pengrajin aktif mengikuti pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ketiga, mengenai Sumber Daya Manusia, pengrajin aktif mengikuti pelatihan yang telah diselenggarakan pemerintah. Keempat, dalam hal desain pengrajin melayani pesanan sesuai keinginan customer.
- c. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil  
Dalam pemanfaatan hasil, partisipasi dari pengrajin pada produk dan pengolahan dengan memanfaatkan mesin jahit yang diberikan oleh pemerintah yang memberikan keuntungan tersendiri bagi pengrajin. Pada pemasaran, hasil yang dirasa para pengrajin yaitu mendapatkan pelanggan baru. Kemudian pada Sumber Daya Manusia, hasil dari mengikuti pelatihan adalah para pengrajin dapat mengimplementasikan hasil pelatihan dengan pembuatan sepatu dan kerajinan kulit yang lainnya yang lebih baik. Terakhir, pada desain yaitu hasilnya pengrajin dapat membuat berbagai macam model sepatu, tas, dan lain sebagainya dengan menyesuaikan pesanan pelanggan.

Jadi, tipologi partisipasi pelaku UMKM dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan terdapat pada partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Pelaku UMKM berpartisipasi dalam wujud menggunakan mesin jahit pemberian dari pemerintah yang memiliki keuntungan sendiri, yaitu proses pembuatan sepatu lebih efisien, Pelaku UMKM juga mengikuti program

pelatihan sehingga mereka memiliki skill dari teori dasar hingga proses pembuatan sepatu, tas, dompet dan lain sebagainya

## Saran

Berdasarkan pada sub bab sebelumnya yakni sub bab kesimpulan, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk beberapa pihak terkait pelaksanaan pengembangan UMKM kerajinan kulit yaitu :

1. Pemerintah  
Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan pelaku UMKM kerajinan kulit di Kabupaten Magetan. Terutama pada masalah Sumber Daya Manusia yang dikeluhkan para pelaku UMKM karena semakin susah mendapatkan tenaga kerja padahal produksi semakin meningkat. Hal ini menjadi hambatan pelaku UMKM dalam pengembangan kerajinan kulit di Magetan sehingga pemerintah harus menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK). Adanya BLK diharapkan dapat melatih tenaga kerja yang baru jadi pada saat pelaku UMKM membutuhkan tenaga kerja sudah disediakan oleh Balai Latihan Kerja tersebut. Selain itu, BLK berfungsi untuk meningkatkan keterampilan produksi kerajinan kulit seperti sepatu, tas, sandal, dompet dan lain-lain.
  2. Pelaku UMKM Kerajinan Kulit  
Untuk pelaku UMKM kerajinan kulit di Kabupaten Magetan diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik dengan pihak pemerintah mengenai kualitas Sumber Daya Manusia yang setiap tahun terjadi penurunan serta diharapkan dapat menjaga mutu kualitas produksi unggulan di Kabupaten Magetan. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk sentra kerajinan kulit di Kabupaten Magetan agar tetap terjaga.
  3. Pengembangan UMKM Kerajinan Kulit  
Diharapkan pelaku UMKM tetap mempertahankan apa yang sudah menjadi ciri khas kerajinan kulit di Kabupaten Magetan yang dikenal dengan sebutan *handmade* karena hal ini menjadikan salah satu daya tarik tersendiri bagi pengunjung atau konsumen. Dari segi kualitas produk kerajinan kulit telah mampu bersaing dengan produk yang sama dari daerah lain.  
Dalam hal pemasaran, pelaku UMKM diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik dengan pihak lain tidak hanya pada pemerintah dengan tujuan melancarkan jaringan bisnis agar produksi pengembangan kerajinan kulit semakin meningkat.
- Bagi pemerintah daerah Kabupaten Magetan diharapkan selalu memberikan dukungan dan perhatian

khusus terutama pada Sumber Daya Manusianya. Sumber Daya Manusia sangat penting untuk keberlangsungan proses produksi kerajinan kulit serta pemerintah lebih tanggap dengan apa yang dikeluhkan pelaku UMKM dalam pengadaan tenaga kerja.

#### Daftar Pustaka

##### Buku dan Jurnal :

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Halik. 2014. Peran Pemerintah Kota Serang Dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional.
- Alim Sumarno. 2012. *Penelitian Kausalitas Komparatif*. Surabaya: elearning unesa
- Alwi Hasan, dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka
- Aristo, Rahadi. 2004. *Media Pembelajaran, Direktorat Tenaga Kependidikan*. Jakarta
- Asngari, PS. 2001. *Peranan Agen Pembaharuan/ Penyuluh dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agribisnis*. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. 2013. *Research design (pendekatan kualitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: pustaka pelajar
- Dani Danuar Tri U. 2013. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang: Diponegoro Journal Of Economics Volume 2, Universitas Diponegoro Semarang
- Diva, Gede. 2009. *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta : Bakrie School of Management
- Hafsah, Muhammad Jaffar. 2004. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Infokop, Nomor 25 Tahun XXX: 40-44
- Handayani, W. (2006). *Psikologi keluarga*. Jakarta : Pustaka Utama
- Harahap, Sofyan Syafri. 2014. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Rajawali Pers*. Jakarta
- Hoessein, Benyamin, Irfan Ridwan Maksum, M Ridwansyah & Nurhayati, 2005. *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Depok : PKPA-DK FISIP UI
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- James P Spradley. 2007. *Metode Etnografi*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Kanfer, R. 1987. *Task Specific Motivation : An Integrative Approach to Issues of Measurement, Mechanisms, Processes, and Determinants*. Journal of Social and Clinical Psychology
- Miftah, Thoha. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Mikkelsen, Briitha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong , 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong J.Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mubyarto. 1994. *Pengantar Ekonomi Pertamina*. Jakarta : Pustaka LP3ES
- Mudrajat Kuncoro, Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Anggota IKAPI. BPFE-Yogyakarta.
- Muh Arsan Labaran, Lukman Hakim, Rudi Hardi. 2016. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao Di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4*. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *KYBERNOLOGY (Ilmu Pemerintah Baru) I*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nelson, Bryant dan White. 1982. *Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang (Edisi Terjemahan)*. Andi Offset. Yogyakarta
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia
- R.A. Supriyono. 2006. *Akuntansi Biaya Buku I: Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok*. Yogyakarta : BPFE.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya
- Rodliyah, St, 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Perencanaan Di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sastropoetra., R.A, Santoso.1986. *Partisipasi, Komunikasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Soerjono, Soekanto. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strateginya)*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif?*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyarso, G.Winarni, F. (2005). *Manajemen keuangan*. Yogyakarta : Media Pressindo

- Slamet, Achmad Dr. H., 2003. *Analisis Laporan Keuangan*. Semarang: Ekonomi-Unnes
- Sukirno, Sadono, 2004. *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sutarto. 1995. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia : Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba
- Thoha , Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Tjandra,W. Riawan, dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan
- Tulus TH Tambunan. 2011. *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang Kasus Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

#### Web :

- <http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/> diakses pada tanggal 13 Maret
- [http://jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/dinamis\\_1\\_2016\\_BAPPEDA.pdf](http://jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/dinamis_1_2016_BAPPEDA.pdf) diakses pada tanggal 23 Maret
- <http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/> diakses pada tanggal 15 april 2017
- <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMM.pdf> diakses pada tanggal 15 April 2017
- Halik, Abdul. 2014. Peran Pemerintah Kota Serang dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional. *Jurnal Bina Praja* Volume 6 Nomor 2 [binaprajajournal.com/ojs/index.php/jbp/article/download/39/36/](http://binaprajajournal.com/ojs/index.php/jbp/article/download/39/36/) diakses pada tanggal 26 April 2017
- Riyanto, Ratih Nur Pratsi, Robby Firmansyah. 2014. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Volume 2 Nomor 2 [administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/356](http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/356) diakses pada tanggal 26 April 2017
- Ningrum, Abrianti Harni. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kelurahan Karanganyar Samarinda Ulu. *E-Journal Sosiologi* Volume 2 Nomor 3 [ejournal.sos.fisipunmul.ac.id/.../eJournal%20Sosiatri%20Desyani%20\(05-14-13-05-1](http://ejournal.sos.fisipunmul.ac.id/.../eJournal%20Sosiatri%20Desyani%20(05-14-13-05-1) diakses pada tanggal 26 April 2017
- Sari, Safutri Dewi. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang. *E-Journal Administrasi Negara* Volume 4 Nomor 2 [ejournal.an.fisipunmul.ac.id/.../2016/.../eJournal%20Dewi%20Safutri%20Sari%20\(PDF...oleh DS Sari - 2016\)](http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/.../2016/.../eJournal%20Dewi%20Safutri%20Sari%20(PDF...oleh DS Sari - 2016)) diakses pada tanggal 26 April 2017

#### Undang-undang :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan